

Katalog BPS : 2302003.82

Survei Angkatan Kerja Nasional

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER I TAHUN 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROV. MALUKU UTARA**



Katalog BPS : 2302003.82

Survei Angkatan Kerja Nasional

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER I TAHUN 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROV. MALUKU UTARA**

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER I TAHUN 2014

ISBN : -
No. Publikasi : 82520.1408
Katalog BPS : 2302003.82
Ukuran Buku : B5 (21,5 x 16,5)
Jumlah Halaman : 27 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dicetak oleh :

<http://malut.bps.go.id>

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Semester II Tahun 2013 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Agustus 2013. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Ternate, Agustus 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



M. Habibullah, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
INDIKATOR TENAGA KERJA	8
INDIKATOR PENGANGGURAN	14
TABEL-TABEL LAMPIRAN	19

<http://malut.bps.go.id>

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER I TAHUN 2014

UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986–1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994–2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002–2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005–2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Hasil Sakernas Triwulan I, II, dan IV disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 50.000 rumah tangga). Sementara Sakernas Triwulan III, disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, karena jumlah sampel cukup besar sekitar 200.000 rumah tangga, dimana jumlah tersebut terdiri dari 50.000 rumah tangga merupakan sampel Sakernas Triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel Sakernas tambahan.

Provinsi Maluku Utara Sampel terpilih untuk Sakernas Februari 2014 berjumlah sekitar 640 rumah tangga dengan tingkat pemasukan dokumen 87,03 persen. Dengan jumlah sampel tersebut hasil Sakernas tabel-tabel yang disajikan dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan daerah (perkotaan dan perdesaan), dengan penomoran tabel yang dimulai dengan tabel total.

Jumlah sampel
untuk Sakernas
Februari 2014 sebanyak
640 rumah tangga

TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan data hasil Sakernas Februari 2014 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

CAKUPAN

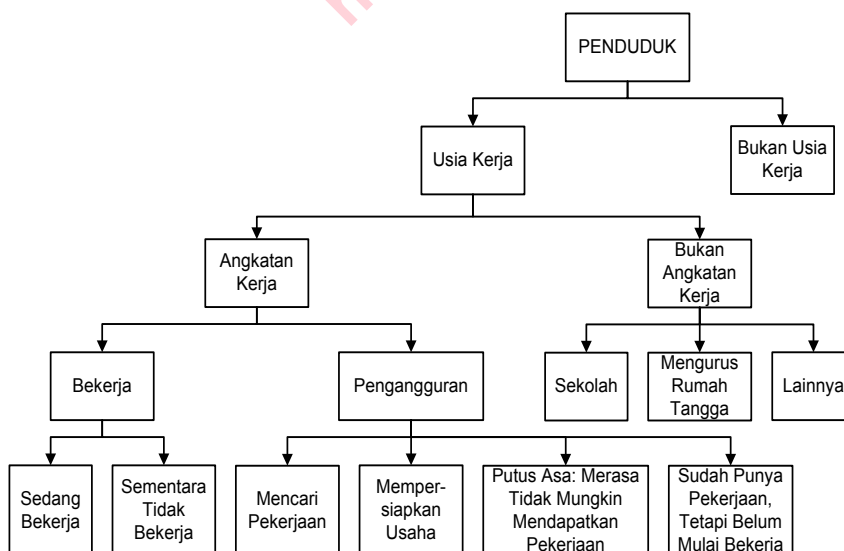
Pembahasan hasil Sakernas Februari 2014 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu penduduk usia kerja, penduduk usia kerja yang bekerja dan indikator pengangguran. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan untuk melihat perkembangannya. Sedangkan untuk melihat keterbandingan antar daerah, beberapa data dan ulasan disajikan menurut kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran

PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Hal ini bertujuan untuk menjamin keterbandingan antar Negara. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

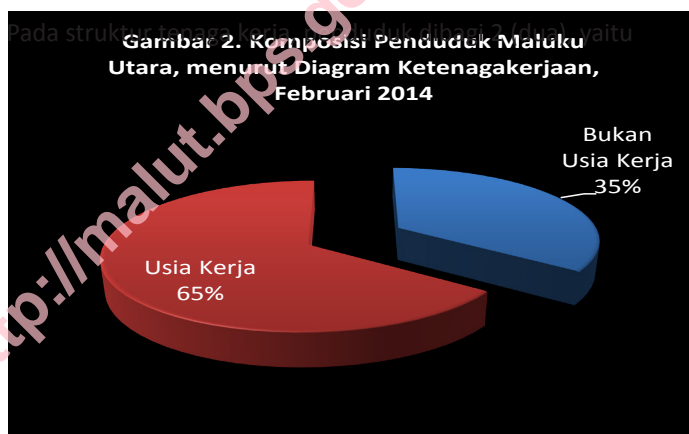
Gambar 1. DIAGRAM KENENAGAKERJAAN



Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah satu minggu. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

PENDUDUK USIA KERJA



Penduduk usia kerja di Provinsi Maluku Utara pada semester I 2014 sebanyak 742.722 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 378.951 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 363.771 jiwa. Dimana 529.855 jiwa atau 71,34 persennya tinggal di wilayah pedesaan dan 212.867 jiwa atau 28,66 persen tinggal di perkotaan.

Penduduk Usia Kerja ini juga dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Mereka yang selama seminggu lalu tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha untuk selanjutnya disebut sebagai penganggur.

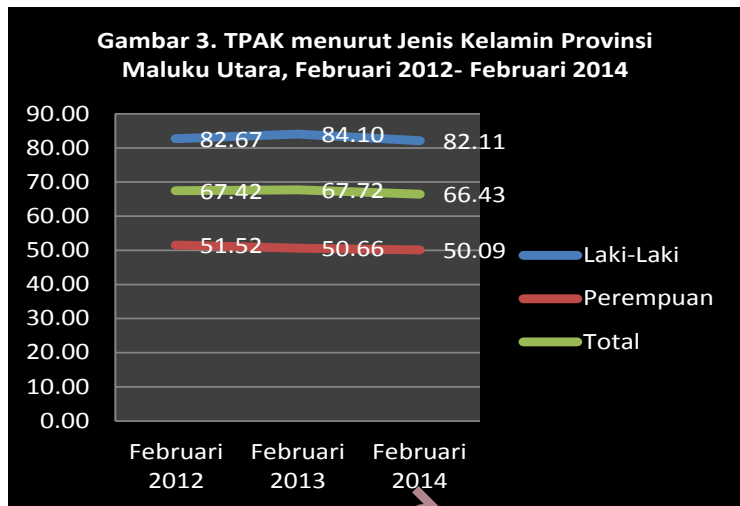
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja (termasuk didalamnya adalah yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan penganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat menunjukkan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Pada Februari 2014, TPAK Maluku Utara mencapai 66,43 persen, yang berarti dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas 66,43 persennya tersedia untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada sementara 33,57 persen orang lainnya dari penduduk usia kerja tidak tersedia untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada karena sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.



Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Maluku Utara selama tiga tahun terakhir selalu jauh lebih rendah dibanding laki-laki.

TPAK laki-laki sebesar 82,11 persen yang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (84,10 %). Sedangkan TPAK perempuan juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (50,66 %) yaitu sebesar 50,09 persen. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Maluku Utara selama tiga tahun terakhir selalu jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini tercermin dari nilai TPAK yang dihasilkan dimana TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dari TPAK perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di kisaran 50 persen. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak memilih untuk mengurus rumah tangga daripada bekerja. Sedangkan berdasarkan daerah tempat tinggal, tidak ada perbedaan yang signifikan proporsi angkatan kerja baik di kota maupun di desa.

Tabel 1. TPAK menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Maluku Utara, Februari 2012- Februari 2014

Daerah Tempat Tinggal	Tahun Publikasi		
	Februari 2012	Februari 2013	Februari 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota	60.38	64.91	62.59
Desa	70.24	68.85	67.97
Total	67.42	67.72	66.43

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan (persen) Provinsi Maluku Utara, Februari 2012- Februari 2014

Tingkat Pendidikan	Februari 2012	Februari 2013	Februari 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	46.47	42.62	42.20
SMP	18.53	16.68	16.81
SMA Umum	20.28	23.50	22.53
SMA Kejuruan	4.65	5.77	3.71
Diploma I/II/III	3.47	3.84	3.88
Universitas	6.60	7.59	10.87
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jika kita telusuri berdasarkan tingkat pendidikannya pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) Ke bawah yang mencapai 42,20 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia kerja yang memutuskan untuk masuk pasar tenaga kerja baik sebagai pekerja maupun pencari kerja meskipun dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Kondisi ini terjadi lantaran di Maluku Utara masih didominasi sektor pertanian yang dikelola secara tradisional dimana pendidikan masih belum dianggap penting sebagian masyarakat sebagai syarat untuk mendapat pekerjaan.

Pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) Ke bawah yang mencapai 42,20 persen

b. Bukan Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 249.365 jiwa. Dimana dalam kategori ini sebagian besar adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 52,18 persen. Sedangkan yang bersekolah sebanyak 36,37 persen. Sisanya 11,45 persen adalah lainnya (pensiunan, orang cacat dll).

PENDUDUK BUKAN USIA KERJA

Penduduk bukan usia kerja di Provinsi Maluku Utara sebanyak 395.945 jiwa atau sekitar 34,8 persen dari seluruh penduduk di Maluku Utara. Penduduk bukan usia kerja tersebut terdiri dari 51,14 persen laki laki dan 48,86 persen perempuan.

PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA

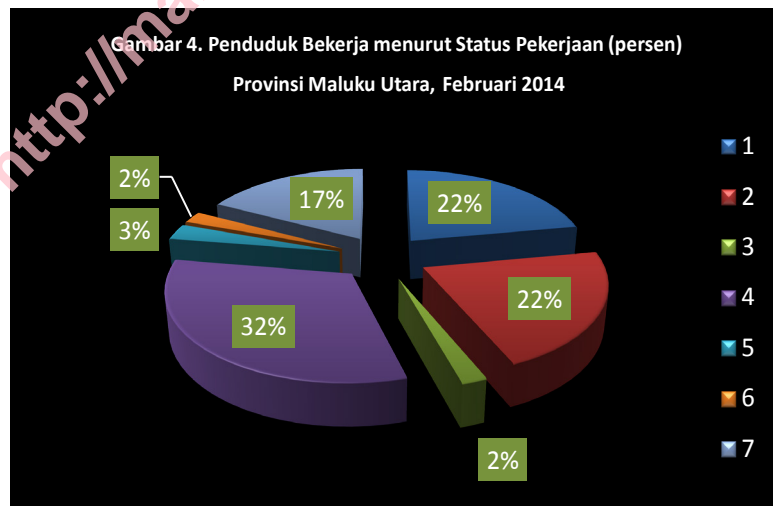
a. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan kemajuan pembangunan, suatu daerah biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Kategori status Pekerjaan Utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 7 (tujuh) yaitu :

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar
4. Buruh/karyawan
5. Pekerja bebas pertanian
6. Pekerja bebas non pertanian
7. Pekerja Tak Dibayar

Sepertiga penduduk yang bekerja di Maluku Utara berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai.



Tabel 3. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan (persen) Provinsi Maluku Utara, Februari 2012- Februari 2014

Status Pekerjaan Utama	Februari 2012	Februari 2013	Februari 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Berusaha sendiri	21.15	20.60	22.13
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	20.96	21.29	21.42
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3.09	2.72	1.95
4. Buruh/karyawan/pegawai	26.78	32.29	32.02
5. Pekerja bebas di pertanian	2.78	2.15	2.92
6. Pekerja bebas di non pertanian	1.35	2.14	2.17
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	23.89	18.82	17.39

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil Sakernas Semester I 2014, di antara tujuh kategori status pekerjaan, buruh/karyawan tercatat yang terbanyak yaitu sebesar 32,02 persen. Sementara terbanyak kedua adalah penduduk yang berusaha sendiri meningkat dari 20,60 persen di 2013 menjadi 22,13 persen pada 2014. Penduduk yang berusaha dibantu pekerja tak dibayar proporsinya juga cukup besar naik dari 20,96 persen di 2012 menjadi 21,42 persen pada 2014. Kelompok penduduk lainnya yang proporsinya cukup besar ialah pekerja keluarga, namun cenderung turun dari 23,89 persen pada 2012 menjadi 17,39 persen pada 2014.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang bekerja menurut status dalam pekerjaan utama, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, Februari 2014

Status Pekerjaan Utama	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Berusaha sendiri	23.28	21.73	24.01	18.76	22.13
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	12.52	24.48	22.23	19.97	21.42
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2.22	1.85	2.72	0.55	1.95
4. Buruh/karyawan/pegawai	50.25	25.74	34.85	26.95	32.02
5. Pekerja bebas di pertanian	0.00	3.93	3.46	1.96	2.92
6. Pekerja bebas di non pertanian	2.88	1.93	3.39	0.00	2.17
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	8.84	20.33	9.33	31.81	17.39

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, pekerja di perkotaan separuh lebih berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu mencapai 50,25. Diikuti terbesar kedua berusaha sendiri sebesar 23,28 persen dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tak dibayar sebesar 12,52 persen. Sedangkan pekerja di pedesaan cenderung merata dimana persentasenya tak jauh berbeda antara berusaha sendiri (21,73%), bekerja dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar (24,48%), Buruh/karyawan/pegawai (25,74%) dan pekerja keluarga/tak dibayar (20,33%).

Sementara berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki paling banyak sebagai pegawai/buruh/karyawan sebesar 34,85 persen. Sedangkan pekerja perempuan sebagian besar adalah pekerja keluarga/tak dibayar mencapai 31,81 persen.

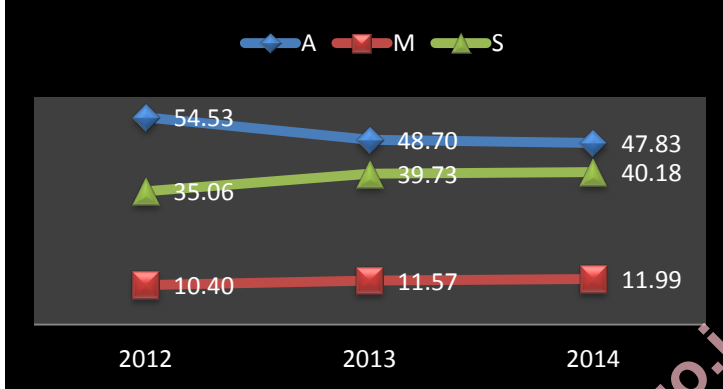
b. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang banyak menyerap tenaga kerja

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang banyak menyerap tenaga kerja. Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu A(griculture), M(anufacture dan S(ervices), berdasarkan pada definisi sektor *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC) System. Lapangan usaha Pertanian atau Agriculture terdiri dari pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Lapangan usaha Industri atau Manufacturing terdiri dari pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air, dan konstruksi. Lapangan usaha Jasa-jasa atau Services adalah selain Pertanian dan Industri.

Gambar 6. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Propinsi Maluku Utara, Februari 2012- Februari 2014



Sampai dengan saat ini, Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris dimana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Namun selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 54,53 persen di tahun 2012 menjadi 47,83 persen di tahun 2014. Sektor jasa terbesar kedua di Maluku Utara dan meningkat selama tiga tahun terakhir hingga mencapai 40,18 persen di 2014. Sedangkan sektor industri walaupun proporsinya kecil, namun terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dari 10,40 persen menjadi 11,99 persen pada 2014.

Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris dimana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, meskipun dalam beberapa tahun terakhir proporsi pekerja sektor pertanian mengalami penurunan

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis kelamin Propinsi Maluku Utara, Februari 2014

Lapangan Pekerjaan	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Agriculture	18.46	57.95	48.14	47.28	47.83
Manufacturing	13.20	11.57	15.04	6.52	11.99
Service	68.34	30.49	36.82	46.20	40.18
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilihat dari lapangan usahanya hampir separuhnya yaitu mencapai 47,83 persen bekerja di sektor pertanian. Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, terdapat perbedaan yang signifikan antara penyerapan lapangan pekerjaan antara di perkotaan dan perdesaan. Untuk wilayah perkotaan lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor S(erVICES)/jasa-jasa, dimana 68,34 persen dari penduduk yang bekerja bekerja di sektor ini, sementara untuk wilayah perdesaan sektor A(griculture)/Pertanian tetap mendominasi dalam kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan mampu menampung 57,95 persen. Sedangkan untuk manufaktur masih relatif sama antara desa dan kota.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan jasa. Dimana proporsi laki-laki dan perempuan di dua sektor tersebut tidak jauh berbeda. Lain halnya dengan sektor industri. Sektor industri lebih banyak menyerap pekerja laki-laki, yaitu dua kali lipat lebih banyak dari tenaga kerja perempuan.

c. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu yang lalu

Dengan melihat jumlah jam kerja selama seminggu terakhir dari penduduk yang bekerja, kita dapat mengetahui proporsi penduduk yang bekerja sebagai pekerja murni/ paruh waktu/ pekerja tidak penuh sukarela dan proporsi penduduk yang bekerja namun dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full Time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Bila pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain itu termasuk setengah penganggur. Namun jika pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan tidak ingin mencari pekerjaan lain atau sudah merasa cukup itu termasuk pekerja paruh waktu (Part Time Worker)

Tabel 6. Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Provinsi Maluku Utara, Februari 2012- Februari 2014

Status Pekerjaan Utama	Februari 2012	Februari 2013	Februari 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang Bekerja	453 866	465 593	465 486
Setengah Penganggur	95 101	66 394	61 915
Pekerja Paruh Waktu	82 454	136 286	119 032
Pekerja Tidak Penuh (<35jam)	177 555	202 680	180 947
Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	20.95	14.26	13.30
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	18.17	29.27	25.57
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35jam) (%)	39.12	43.53	38.87

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara berada di kisaran 38 sampai 43 persen, dimana tertinggi di tahun 2013. Pada Februari 2014, tingkat pekerja tidak penuh turun menjadi 38,87 persen. Pekerja tidak penuh ini separuh lebih adalah pekerja perempuan yaitu mencapai 56,74 persen. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya ternyata hampir sebagiannya tinggal di desa (43,90 persen).

Pekerja tidak penuh ini terdiri dari pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Dari tahun ke tahun tingkat pekerja setengah penganggur terus menurun hingga di 2014 menjadi 13,30 persen. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perbaikan pekerja karena sudah mulai beralih ke jam kerja normal. Sedangkan tingkat pekerja tidak penuh selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat yaitu mencapai 25,57 persen di 2014.

Tabel 7. **Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja, Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara, Februari 2014**

Rincian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk yang Bekerja	119 240	346 246	29 8708	166 778	465 486
Setengah Penganggur	5 021	56 894	41 932	19 983	61 915
Pekerja Paruh Waktu	23 936	95 096	44 389	74 643	119 032
Pekerja Tidak Penuh (<35jam)	28 957	151 990	86 321	94 626	180 947
Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	4.21	16.43	14.04	11.98	13.30
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	20.07	27.46	14.86	44.76	25.57
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35jam) (%)	24.28	43.90	28.90	56.74	38.87

Sumber : Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Maluku Utara

d. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Hampir separuh penduduk yang bekerja di Maluku Utara adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

Dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik atau pendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Selama periode februari 2012 sampai februari 2014, hampir separuh penduduk yang bekerja di Maluku Utara adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu mencapai 43,79 persen di tahun 2014. Hal ini wajar terjadi karena memang pasokan angkatan kerja atau SDM yang ada di Maluku Utara sebagian besar adalah lulusan SD ke bawah.

Tabel 8. Penduduk Bekerja menurut Tingkat Pendidikan (persen) Provinsi Maluku Utara, Februari 2012- Februari 2014

Tingkat Pendidikan	Februari 2012	Februari 2013	Februari 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	47.98	44.38	43.79
SMP	18.44	16.83	17.37
SMA Umum	19.43	21.95	21.30
SMA Kejuruan	4.53	5.62	3.83
Diploma I/II/III	3.51	3.75	3.70
Universitas	6.11	7.47	10.02
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Terbesar kedua adalah pekerja lulusan SMA Umum yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari 20,33 persen di 2012 menjadi 21,30 persen di 2014. Sementara itu, meski terus mengalami peningkatan namun masih sedikit penduduk yang bekerja yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan universitas. Hingga februari 2014 hanya 10,02 persen dari penduduk yang bekerja yang berpendidikan universitas.

Tabel 9. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2014

Tingkat Pendidikan	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	20.59	51.78	38.32	53.58	43.79
SMP	18.84	16.86	18.52	15.29	17.37
SMA Umum	32.89	17.31	27.06	10.99	21.30
SMA Kejuruan	8.50	2.22	4.26	3.05	3.83
Diploma I/II/III	4.85	3.30	2.51	5.83	3.70
Universitas	14.33	8.53	9.32	11.27	10.02
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

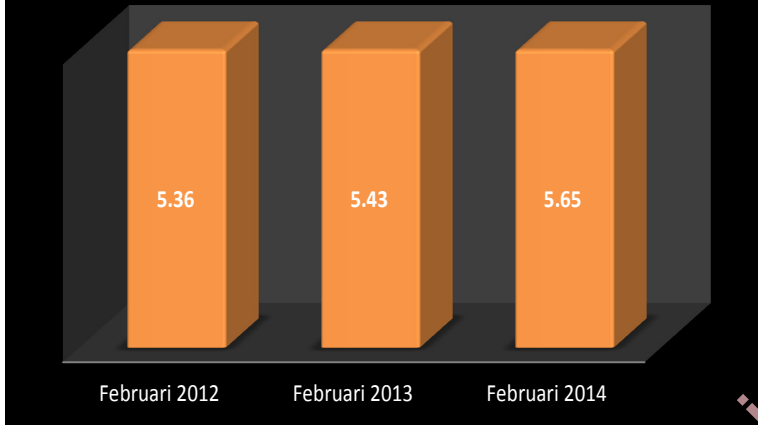
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, tingkat kemiskinan “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan (memilih menganggur daripada bekerja pada tingkat pendapatan atau status sosial yang lebih tinggi) meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara si miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

*T i n g k a t
Pengangguran Terbuka
(TPT) menggambarkan
proporsi angkatan kerja
yang tidak memiliki
pekerjaan yang secara
aktif mencari kerja/
mempersiapkan usaha.*

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan mencari pekerjaan

Gambar 7. Tingkat Pengangguran Maluku Utara, Februari 2012-
Februari 2014



Pada semester I 2014, TPT Maluku Utara mencapai 5,65 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara yang termasuk kategori penganggur ada sekitar 5 sampai 6 orang.

Pada tiga tahun terakhir, TPT di Maluku Utara mengalami sedikit kenaikan. Dari yang semula 5,36 persen pada februari 2012 naik menjadi 5,43 persen pada Februari 2013 dan terakhir naik lagi menjadi 5,63 persen pada Februari 2014.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, tingkat pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di pedesaan yang mencapai tiga kali lipatnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran perempuan dua kali lipat lebih dibanding laki-laki.

T i n g k a t pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di pedesaan yang mencapai tiga kali lipatnya

Tabel 5. Tingkat Pengangguran (TPT) menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis kelamin Propinsi Maluku Utara, 2012-2014

Tahun	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	10.17	3.70	3.17	9.01	5.36
2013	7.60	4.60	3.67	8.46	5.43
2014	10.50	3.85	4.00	8.47	5.65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 10. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2014

Tingkat Pendidikan	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	4.61	1.74	1.79	2.50	2.10
SMP	2.61	2.49	2.04	3.54	2.52
SMA Umum	11.58	10.29	6.16	26.80	10.80
SMA Kejuruan	4.51	0.00	0.00	8.62	2.62
Diploma I/II/III	25.01	0.00	6.95	12.33	10.07
Universitas	21.44	7.32	10.72	16.26	13.04

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

*T i n g k a t
p e n g a n g g u r a n
t e r t i n g g i a d a l a h l u l u s a n
u n i v e r s i t a s y a i t u
m e n c a p a i 13,04 p e r s e n.*

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan universitas yaitu mencapai 13,04 persen. Dimana mereka sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran lulusan universitas di perkotaan cukup tinggi yaitu mencapai 21,44 persen. Kondisi yang tak jauh berbeda juga dialami lulusan Diploma (Tabel 10). Kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan (memilih menganggur daripada bekerja pada tingkat pendapatan atau status sosial yang lebih tinggi) meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah. atau apabila dilihat dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan bisa dikatakan tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan untuk lulusan universitas.

Tingkat pengangguran terbesar yang menduduki urutan kedua adalah lulusan SMA Umum yaitu mencapai 10,80 persen. Dimana penganggur ini didominasi oleh penganggur perempuan.

Sedangkan tingkat pengangguran di Maluku Utara paling rendah adalah lulusan SD ke bawah yaitu sebesar 2,10 persen. Biasanya seseorang dengan pendidikan rendah cenderung memilih mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup. Inilah yang menekan tingkat pengangguran bagi lulusan SD ke bawah menjadi kecil.

<http://malut.bps.go.id>

TABEL-TABEL LAMPIRAN

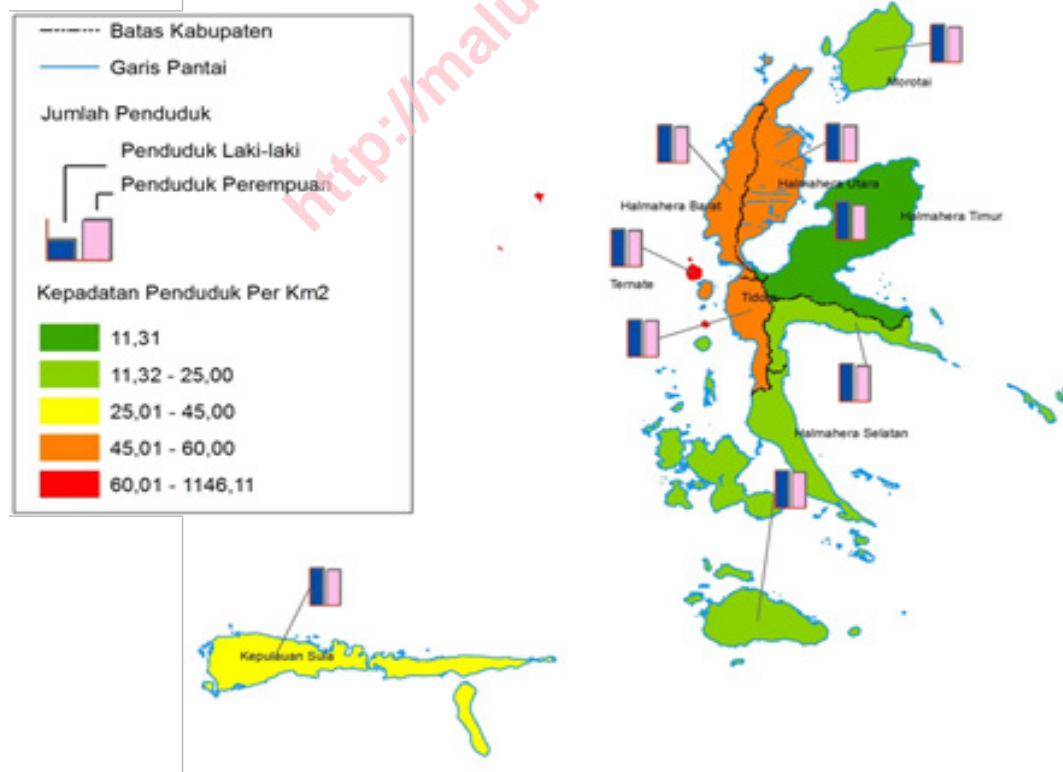
<http://malut.bps.go.id>

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2011-2014

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	102 884	104 807	106 791	108 769
Halmahera Tengah	44 301	45 712	47 079	48 414
Kepulauan Sula	87 481	89 374	91 406	93 435
Halmahera Selatan	203 822	207 728	211 682	215 791
Halmahera Utara	166 077	169 599	173 117	176 573
Halmahera Timur	75 834	78 112	80 526	82 914
Pulau Morotai	54 401	55 998	57 565	59 102
Pulau Taliabu	48 134	48 880	49 510	50 067
Ternate	192 392	197 566	202 728	207 789
Tidore Kepulauan	91 886	93 299	94 493	95 813
Maluku Utara	1067 212	1091 075	1114 897	1138 667

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara



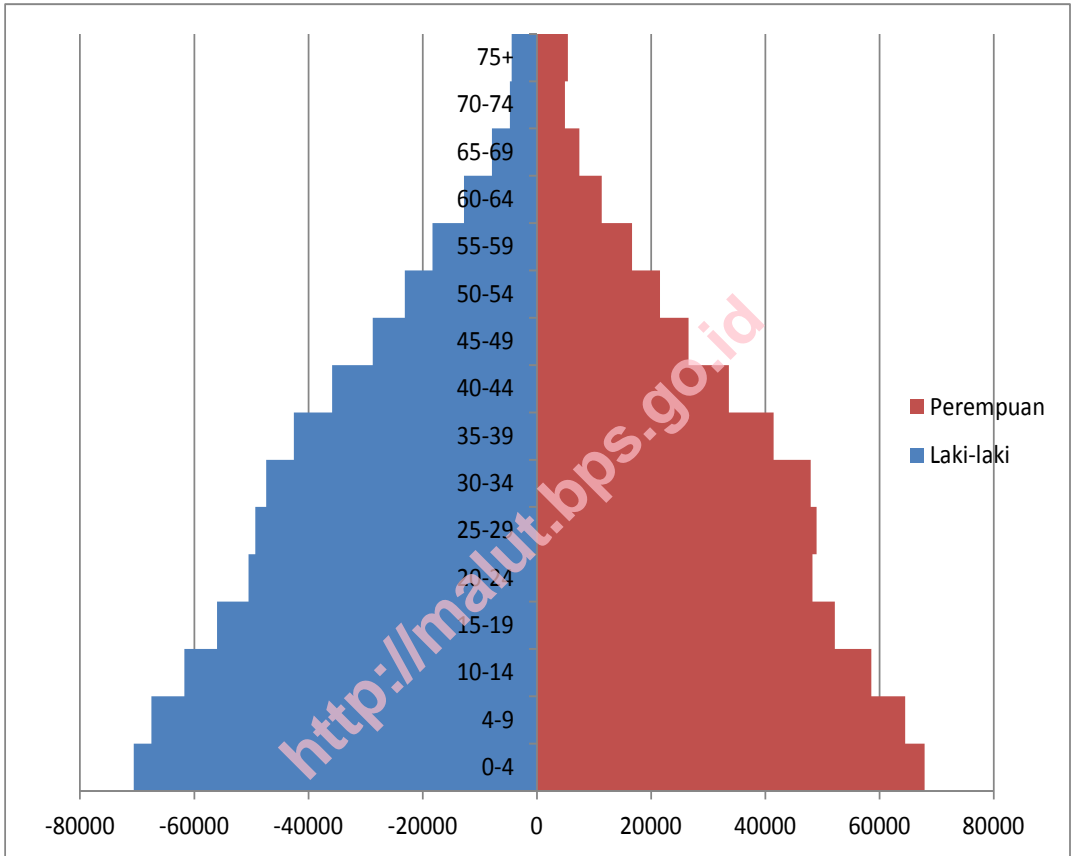
Tabel 2 Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	70 568	67 902	138 470
5-9	67 496	64 518	132 014
10-14	61 744	58 593	120 337
15-19	56 008	52 156	108 164
20-24	50 485	48 270	98 755
25-29	49 291	48 996	98 287
30-34	47 393	47 967	95 360
35-39	42 551	41 444	83 995
40-44	35 862	33 603	69 465
45-49	28 722	26 569	55 291
50-54	23 113	21 585	44 698
55-59	18 288	16 685	34 973
60-64	12 786	11 362	24 148
65-69	07 856	07 424	15 280
70-74	04 713	04 890	09 603
75+	04 388	05 439	09 827
JUMLAH	581 264	557 403	1138 667

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2014



Tabel 3 Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Kegiatan Utama

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2012	Februari 2013	Februari 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	711 274	726 965	742 722
2. Angkatan Kerja	479 565	492 309	493 357
Bekerja	453 866	465 593	465 486
Penganggur	25 699	26 716	27 871
3. Bukan Angkatan Kerja	231 709	234 656	249 365
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67.42	67.72	66.43
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.36	5.43	5.65
6. Pekerja tidak penuh	177 555	202 680	180 947
Setengah Penganggur	95 101	66 394	61 915
Paruh Waktu	82 454	136 286	119 032

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 4 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan	Februari 2012	Februari 2013	Februari 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	247 513	226 750	222 648
2 Pertambangan dan Penggalian	12 063	17 625	12 435
3 Industri	16 537	12 774	16 068
4 Listrik, Gas dan Air Minum	1 824	947	2 361
5 Konstruksi	16 784	22 540	24 925
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	48 117	55 514	55 153
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	27 918	26 008	29 395
8 Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	3 564	9 000	5 136
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	79 546	94 435	97 365
JUMLAH	453 866	465 593	465 486

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 5 Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan di Maluku Utara, Februari 2014

Tingkat Pendidikan	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	TPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD ke bawah	208 201	203 832	04 369	2.10
Sekolah Menengah Pertama	82 925	80 834	02 091	2.52
Sekolah Menengah Atas	111 167	99 156	12 011	10.80
Sekolah Menengah Kejuruan	18 295	17 816	00 479	2.62
Diploma I/II/III	19 145	17 218	01 927	10.07
Universitas	53 624	46 630	06 994	13.04
JUMLAH	493 357	465 486	27 871	5.65

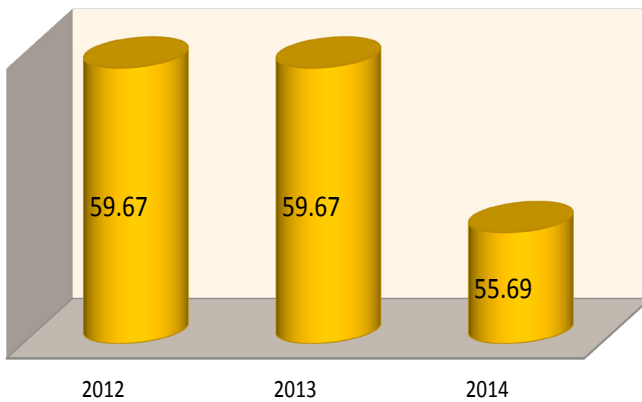
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 6 PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Sektor Ekonomi Triwulan I Tahun 2014 (Milliar Rupiah)

Status Pekerjaan	ADHB	ADHK	Laju Pertumbuhan Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	698,26	294,28	1,66
2 Pertambangan dan Penggalian	76,06	28,57	-15,75
3 Industri	260,87	107,89	7,62
4 Listrik, Gas dan Air Minum	11,85	4,60	10,07
5 Konstruksi	67,50	18,18	5,07
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	566,29	301,78	12,33
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	158,40	76,69	6,90
8 Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	78,93	35,28	9,13
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	146,91	75,89	9,03
JUMLAH	2.065,07	943,17	6.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara 2012-2014



Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) memberikan gambaran kasar beban ekonomi yang dihadapi suatu populasi. Angka ini secara umum memperlihatkan seberapa banyak penduduk usia tidak produktif yang menjadi beban tanggungan bagi penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan Maluku Utara pada tahun 2014 sebesar 55,69 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Maluku Utara akan memiliki tanggungan sebanyak 56 penduduk tidak produktif.

Berdasarkan hasil proyeksi, rasio ketergantungan ini akan terus menurun secara perlahan menuju kondisi “Bonus Demografi”, yakni kondisi dimana rasio ketergantungan berada pada kisaran 50. Dengan kata lain, dalam kondisi tersebut, setiap 2 orang penduduk usia produktif hanya menanggung 1 orang penduduk usia tidak produktif, sehingga berpotensi memiliki dampak positif terhadap perekonomian.

- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
 - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

- Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.

- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga atau melakukan kegiatan lainnya.

- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.

- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl Stadion No 65 Ternate

Telp (0921)3127878 Fax : (0921)3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id>

Email : bps8200@bps.go.id